



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume. VII No. 3

Mei - Agustus 2015

ISSN: 1979-0759

- | | |
|---|----|
| ♦ Anton Trianto. Analisis <i>Constant Market Share</i> Pada Ekspor Komoditi Non Migas Unggulan Di Provinsi Sumatera Selatan | 1 |
| ♦ Ayu Puspasari. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atau Buruh Untuk Menunaikan Ibadah Shalat Pada Saat Bekerja di Wilayah Perusahaan | 11 |
| ♦ Fransisca Uly Marshinta. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sarana Keselamatan Pada Objek Wisata Hutan Punti Kayu | 17 |
| ♦ A. Jalaludin, Dewi Fadila, Nyimas. Pemanfaatan Digital Library Politeknik Negeri Sriwijaya Sebagai Sumber Referensi Dalam Penyusunan Laporan Akhir | 23 |
| ♦ Mahdi Hendrich. Audit Ketaatan Atas Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai | 34 |
| ♦ Rini. Pengaruh Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pemahaman Profesi Sekretaris dengan Kepercayaan Diri sebagai Variabel Intervening (Studi pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya) | 41 |
| ♦ Sri Winarni. Analisis Perlakuan Akuntansi Kas Kecil Pada PT. Andromedia Graha Palembang | 50 |
| ♦ Wasitoh Meirani, Della Dwi Oktarina. Faktor Penyebab Rendahnya Minat Mahasiswa Dalam Menulis Karya Ilmiah Studi Kasus Perkuliahan Bahasa Indonesia di Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya | 58 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM - PALEMBANG**

Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni

Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam

Pengarah : Pembantu Direktur I

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam

Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.

Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak.
(STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Mahdi Hendrich, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
7. Fitria Damayanti, S. Pd. M. Pd. (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi :

1. Desi Rovita, A. Md.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume VII No. 3 Periode Mei-Agustus Tahun 2015 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Tim Penyunting

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam. Redaksi juga memberi kesempatan bagi perusahaan yang ingin mempromosikan usaha.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam

- Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003
- E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
- Kontak Person: Desi Rovita, A. Md. (0813 6708 7186)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAU BURUH UNTUK MENUNAIKAN IBADAH SHALAT PADA SAAT BEKERJA DI WILAYAH PERUSAHAAN

AYU PUSPASARI

Pengajar UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30129 Telp: 0711-353414
Fax: 0711-355918 Email: Info@mail.Polisriwijaya.ac.id No Hp: 082177950000

ASBTRACT

Judicial protection of workers of laborers to pilgrimage prayer at work in the company has ben arranged by Law No. 13 of 2003. According to Article No. 80 of the Law, employers are required to provide sufficient opportunity for workers or laborers to fulfill worship according to their religion. If the obligation is violated, then the employer may be given sanctions in the form of imprinsonment of rines as well as the rights or pay compensation to workers or laborers. The sanctions that have been included in Article 185 paragraph (1) and Article 189 Law No. 13 of 2003. Thus, the law is used as a means to protect workes or laborers in the pilgrimage prayer while working at the company are criminal law and civil law. Although employment has been protected by law, but in fact there are still employers who violate workers or laborers rights in question. Therefore, to prevent violations of the rights if the workers or laborers by employers, the Indonesian government should actively supervise companies that exist. In addition, should employers who violate workrers or laborers rights to pilgrimage prayer at work are also given administrative sanctions referred to in Article 190 Law No. 13 of 2003.

Keywords: *Legal Protection, Workers or Laborers, Praying, Work.*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat pada saat bekerja di perusahaan telah diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003. Menurut Pasal 80 undang-undang tersebut, pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya. Jika kewajiban itu dilanggar, maka pengusaha dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara dan atau denda serta membayar hak-hak atau ganti rugi kepada pekerja atau buruh. Sanksi itu telah dicantumkan pada Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 UU No. 13 Tahun 2003. Dengan demikian, hukum yang digunakan untuk sebagai sarana untuk melindungi pekerja atau buruh dalam menunaikan ibadah shalat pada saat bekerja di perusahaan adalah hukum pidana dan hukum perdata. Meskipun tenaga kerja telah dilindungi oleh hukum, tetapi di dalam kenyataannya masih ada pengusaha yang melanggar hak pekerja atau buruh dimaksud. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak pekerja atau buruh tersebut oleh pengusaha, maka pemerintah Indonesia harus aktif mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada. Di samping itu, seyogyanya pengusaha yang melanggar hak pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat pada saat bekerja juga diberikan sanksi administratif yang dicantumkan pada Pasal 190 UU No. 13 Tahun 2003.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja atau Buruh, Shalat, Bekerja*

PENDAHULUAN

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003). Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan pekerja atau buruh sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 1 angka (3) undang-undang tersebut adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Konsiderans menimbang huruf (a) dan (b) UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pmbangunan manusia Indonesia seutuhnya

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. (konsiderans menimbang huruf c dan d UU No. 13 Tahun 2003).

Dengan demikian dapatlah dinyatakan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. (alenia kedua Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2003).

Sebagai perwujudan dari upaya melindungi tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh, maka di dalam UU No. 13 Tahun 2003 diatur mengenai hak-hak dasar pekerja atau buruh. Meskipun undang-undang itu telah mengaturnya, tetapi di dalam kenyataannya masih ada perusahaan atau pengusaha yang melanggar hak asasi pekerja/ buruh. Misalnya yang terjadi di Batam Kepulauan Riau, yang

mana PT. Wesmart Tekstil melarang pekerja atau buruh untuk shalat di area perusahaan. Dalam hal ini, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan mogok kerja di depan perusahaan yang beralamat di Blok E1 Kawasan Latrade Industrial Park, Tanjungguncang. Demo dilakukan untuk mengubah kebijakan perusahaan yang selama ini dinilai sangat merugikan pekerja.

Dari keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah perlindungan hukum bagi pekerja/ buruh dalam hubungannya dengan pemenuhan hak asasi dalam menjalankan shalat. Pembahasan ini akan dihubungkan dengan pengaturan di dalam UU No. 13 Tahun 2003. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah: "Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat pada saat bekerja di wilayah perusahaan?"

PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan diberikan 2 (dua) arti, yaitu: 1) Tempat berlindung; dan 2) Perbuatan atau hal dan sebagainya melindungi. (Zazili, 2008: 66). Dari kedua arti secara bahasa itu, dalam pembahasan ini yang digunakan adalah arti yang kedua. Jika dihubungkan dengan hukum, maka perlindungan hukum merupakan perbuatan atau hal dan sebagainya melindungi dengan sarana hukum. Hal ini sesuai dengan pengertian perlindungan hukum yang diberikan oleh Wahyu Sasongko (Zazili, 2008: 66), yaitu perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Kemudian bagaimana hubungan antara perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sering disebut dengan istilah asing "*human rights*" merupakan suatu hak mendasar (*fundamental*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Di Indonesia masalah hak asasi manusia telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu: Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J. Masalah hak asasi manusia sebelum dicantumkan di dalam UUD 1945 diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999). Undang-undang ini sebagai pelaksanaan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia dipercayai memiliki nilai universal yang artinya tidak mengenal batas dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. (Yuliantiningsih, 2008: 193). Dalam pengertian terkini, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada semua manusia, tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal usul kebangsaan dan entitas warna kulit, agama atau keyakinan, bahasa, atau status-status lainnya. (Abidin, 2013: 4). Di Indonesia pengertian hak asasi manusia dicantumkan di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sesuai dengan pengertian hak asasi manusia yang diberikan oleh UU No. 39 Tahun 1999 maka kewajiban melindungi hak asasi manusia diberikan kepada negara, pemerintah dan setiap orang. Kemudian menurut Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi, yang bertanggung jawab melindungi hak asasi manusia adalah negara, terutama pemerintah. Di dalam Pasal 28H ayat (5) UUD 1945 ditentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari kedua UUD 1945 tersebut terlihat adanya hubungan antara perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang dicantumkan di dalam UUD 1945, maka pelaksanaannya dijamin, dan diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perlindungan hak asasi manusia dilakukan dengan menggunakan sarana hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Diatur dan dicantumkan hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum. Di samping itu pengaturan dan penguangan hak asasi manusia di

dalam peraturan perundang-undang juga merupakan cerminan dari negara hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebelum amandemen, Indonesia sebagai negara hukum dicantumkan di dalam Penjelasan UUD 1945 yang bunyinya "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Qamar (2013: 23) menyatakan bahwa beberapa pakar hukum di Indonesia biasa menyebut negara hukum dalam bahasa asing dengan istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Makna yang terkandung di dalam kedua istilah ini adalah menunjuk pada sosok suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan dijalankan dengan aturan main hukum (*rule of the game*) (*government under law*), pemerintahan tidak berdasarkan kehendak manusia (*government by law, not by men*) dan *machtsstaat* (kekuasaan).

Menurut A. Mukti Fajar, konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep *absolutisme* yang telah melahirkan negara kesatuan. Pada intinya, kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan ini dilakukan dengan jalan supremasi hukum, yaitu segala tindakan penguasa tidak boleh sekendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa. (Rishan, 2013: 9-10).

Negara hukum adalah negara dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Tujuan dari negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Di samping itu, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum diketahui dari elemen-elemen atau unsur-unsurnya yang tertuang di dalam undang-undang dasar beserta peraturan pelaksanaannya, dan yang terpenting dalam praktek sudah dilaksanakan atau belum. (Joeniarto, 1968: 8). Salah satu unsur dari konsep negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia unsur itu telah dicantumkan di dalam undang-undang dasar (UUD 1945) yang telah diuraikan di halaman sebelumnya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan antara perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terdapat hubungan yang sangat erat. Hubungan ini terlihat karena perlindungan hak

asasi manusia yang dicantumkan di dalam UUD 1945 diatur dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yang dibentuk oleh negara. Oleh karena pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia itu diatur dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat juga disebut sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja atau Buruh Untuk Menunaikan Ibadah Shalat pada Saat Bekerja Di Wilayah Perusahaan

Pada sub bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi dengan menggunakan sarana hukum. Jika dihubungkan dengan sub bahasan ini, maka perlindungan hukum terhadap hak pekerja atau buruh berarti perbuatan melindungi hak pekerja atau buruh dengan menggunakan sarana hukum, yaitu untuk menunaikan ibadah shalat pada saat bekerja di wilayah perusahaan. Sehubungan dengan hak asasi manusia itu di dalam UUD 1945 telah dicantumkan pada Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Melihat bunyi Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, maka hak untuk menjalankan ibadah shalat merupakan kebebasan bagi seorang untuk beribadat menurut agamanya. Oleh karena itu hak untuk menjalankan ibadah shalat merupakan suatu hak atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk yang berstatus sebagai pekerja atau buruh. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 hak atas kebebasan itu diatur pada Bab III Bagian Kelima dengan judul "Hak Atas Kebebasan Pribadi". Hak atas kebebasan untuk menjalankan ibadah secara lebih spesifik diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menunaikan ibadah shalat merupakan hak atas kebebasan bagi setiap orang, termasuk yang berstatus sebagai pekerja atau buruh. Ibadah shalat sebagai suatu hak maka tidak ada yang boleh menghalangi selagi tidak mengganggu hak

asasi orang lain. menghalangi setiap pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat berarti menghalangi pemenuhan hak asasinya. Di halaman sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia adalah negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, tanggung jawab atas perlindungan terhadap pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat sebagai salah satu hak asasi manusia adalah negara, terutama pemerintah.

Dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya maka negara (pemerintah) mengatur lebih lanjut hak pekerja atau buruh itu di peraturan perundangan-undangan, yaitu: UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 80 undang-undang tersebut menentukan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Sesuai dengan ketentuan itu, maka jelas pengusaha diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah shalat dengan waktu yang cukup. Kata "wajib" menunjukkan bahwa pemberian kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat dengan waktu secukupnya merupakan suatu keharusan bagi pengusaha. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat menurut agamanya masing-masing.

Demi terlaksananya hak pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat pada saat bekerja di wilayah perusahaan, maka negara (pemerintah) mengancam pelaku (pengusaha) dengan sanksi berupa pidana. Sanksi itu telah dicantumkan di dalam Pasal 185 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah)."

Jika melihat bunyi Pasal 185 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 di atas, maka salah satu perbuatan yang dilarang adalah yang dicantumkan pada Pasal 80, yaitu tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat. Dengan demikian, sanksi pidana yang diancamkan kepada

pengusaha yang melanggar Pasal 80 UU No. 13 Tahun 2003 adalah penjara dan atau denda. Kemudian Pasal 189 UU No. 13 Tahun 2003 menentukan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/ atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh. Di samping itu, kepada pengusaha juga diancam dengan sanksi administratif.

Sanksi administratif dimaksud dicantumkan pada Pasal 190 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;
 - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Sanksi administratif yang dicantumkan di dalam Pasal 190 UU No. 13 Tahun 2003 di atas tidak berlaku bagi pengusaha yang tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat. Jadi, sanksi yang diancamkan kepada pengusaha yang tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat adalah sanksi pidana dan atau denda serta membayar hak-hak dan atau ganti rugi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukum yang digunakan sebagai sarana untuk melindungi tenaga kerja dalam menunaikan ibadah shalat adalah hukum pidana dan hukum perdata.

Meskipun perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja untuk menunaikan ibadah shalat telah diatur secara tegas oleh UU No. 13 Tahun 2003, tetapi di dalam kenyataannya masih saja ada

pengusaha yang mengabaikannya. Misalnya yang terjadi terhadap pekerja atau buruh di PT. Westmart Tekstil yang telah disebut di bagian pendahuluan makalah ini, yaitu dilarang shalat di wilayah perusahaan. Pengabaian atas hak pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat berarti pengusaha telah melanggar hak asasi manusia. Hal ini berarti pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 khususnya mengatur masalah kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kesempatan yang secukupnya bagi pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat tidak efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat pada saat bekerja di wilayah perusahaan telah diatur secara tegas oleh UU No. 13 Tahun 2003. Hukum yang digunakan sebagai sarana untuk melindungi pekerja atau buruh dalam memenuhi haknya untuk menunaikan ibadah shalat adalah hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana ditunjukkan dengan adanya ancaman sanksi berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Kemudian hukum perdata ditunjukkan dengan adanya ancaman sanksi berupa membayar hak-hak dan/atau ganti rugi kepada pekerja atau buruh. Demi terlaksananya hak asasi pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadah shalat pada saat bekerja di wilayah perusahaan dengan efektif, maka negara (pemerintah) harus lebih aktif dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian menurut penulis, di samping sanksi pidana dan pembayaran hak-hak atau ganti rugi, seharusnya kepada pengusaha yang melanggar hak pekerja atau buruh dimaksud juga diancam dengan sanksi administratif. Hal ini penting karena mengingat ibadah shalat merupakan suatu kebutuhan yang diwajibkan bagi semua umat manusia oleh Tuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. 2013. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Makalah Disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Panitia RANHAM di Padang, tanggal 13 Juni.

<http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/13/buruh-dilarang-saolat-hamil-diminta-resign-dan-tak-ada-cuti-selama-kerja>

Joeniarto. 1968. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.

- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusi dalam Negara Hukum (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rishan, Idul. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Yuliantiningsih, Aryuni. 2008. *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September.

- Zazili, Ahmad. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional (Tesis)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.